

# EVALUASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA DI KOTA BENGKULU

Daruna Eka Nugraha

32.0249

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : [32.0249@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0249@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi : Sudarmono, S.STP, M.Si, Ph.D

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** The implementation of Indonesia's One Data Policy (Satu Data Indonesia/SDI) in Bengkulu City as part of the Electronic-Based Government System (SPBE) regulated through Bengkulu Mayor Regulation Number 19 of 2022 has not been running optimally, with a low SDI Index of 23.72. This issue needs to be evaluated to identify inhibiting factors and development solutions.

**Purpose:** This research aims to evaluate the implementation of Indonesia's One Data Policy in Bengkulu City and identify the role of the Department of Communication and Informatics as the data steward in implementing this policy. **Method:** The research uses an evaluative approach with William N. Dunn's six evaluation dimensions, including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and feasibility. Data collection techniques were carried out through interviews, documentation, and observations of SDI policy implementation in Bengkulu City. **Results:** The research results show that the implementation of SDI in Bengkulu City is hampered by several main factors: (1) limited budget that is not specifically allocated, (2) limited human resources competent in statistics, (3) minimal coordination between government agencies (OPD), and (4) the absence of a clear regional action plan. The role of the Department of Communication and Informatics as the data steward includes developing a city-level SDI portal, coordinating the SDI implementation forum, and disseminating SDI information. **Conclusion:** The implementation of Indonesia's One Data Policy in Bengkulu City has not been running optimally due to various technical and managerial constraints. This research recommends the importance of specific budget allocation, human resource capacity building, comprehensive regional action plan development, and strengthening coordination among stakeholders to improve the quality of SDI implementation in Bengkulu City.

**Keywords:** Indonesia One Data, Policy Evaluation, Electronic-Based Government System, Bengkulu City

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Bengkulu sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur melalui Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2022 belum berjalan optimal, dengan Indeks SDI yang masih rendah sebesar 23,72. Permasalahan ini perlu dievaluasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan solusi pengembangannya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Bengkulu dan mengidentifikasi peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata dalam implementasi kebijakan tersebut. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan evaluatif dengan enam dimensi evaluasi William N. Dunn, meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan. Teknik pengumpulan data dilakukan

melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap implementasi kebijakan SDI di Kota Bengkulu. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SDI di Kota Bengkulu terhambat oleh beberapa faktor utama, yaitu: (1) keterbatasan anggaran yang tidak dialokasikan secara khusus, (2) terbatasnya SDM yang kompeten di bidang statistik, (3) minimnya koordinasi antar-OPD, dan (4) belum adanya rencana aksi daerah yang jelas. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata meliputi pengembangan portal SDI tingkat kota, koordinasi forum penyelenggara SDI, dan penyebaran informasi SDI. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Bengkulu belum berjalan optimal karena berbagai kendala teknis dan manajerial. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya alokasi anggaran khusus, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan rencana aksi daerah yang komprehensif, dan penguatan koordinasi antar-pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas implementasi SDI di Kota Bengkulu.

**Kata kunci:** Satu Data Indonesia, Evaluasi Kebijakan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kota Bengkulu

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi keniscayaan bagi pemerintah Indonesia guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi (Danrivanto, 2022). Salah satu bentuk konkret dari transformasi ini adalah implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, pelaksanaan SPBE dan SDI di tingkat daerah, termasuk di Kota Bengkulu, masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang belum merata, serta kurangnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kesenjangan antar sistem informasi dan belum adanya standarisasi data yang menyeluruh turut memperparah kondisi ini (Sutanta & Istiyanto, 2012). Di sisi lain, keterlibatan stakeholder eksternal juga masih minim, yang menyebabkan rendahnya relevansi dan akurasi data (Azizah & Permana, 2024).

Pemerintah Kota Bengkulu telah mengadopsi kebijakan nasional melalui Peraturan Walikota Nomor 15 dan 19 Tahun 2022 sebagai upaya untuk mendukung SPBE dan SDI. Dalam implementasinya, peran instansi seperti Dinas Kominfo sebagai walidata dan Bappeda sebagai koordinator forum Satu Data sangat krusial. Meski demikian, realisasi di lapangan belum optimal karena masih terdapat kendala seperti ego sektoral antar OPD, keterbatasan praktisi data, serta penyebaran aplikasi dan website yang belum terintegrasi (Delima Sari, 2023). Walaupun indeks SPBE Kota Bengkulu menunjukkan angka 2,61 (kategori baik), hal ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap kebijakan SDI di Kota Bengkulu menjadi penting untuk mengidentifikasi solusi konkret demi mewujudkan tata kelola data yang lebih terintegrasi dan efektif.

### 1.2 Gap Penelitian

Kesenjangan antara penilaian formal yang menunjukkan Kota Bengkulu telah mencapai indeks SPBE sebesar 2,61 (predikat baik) dengan kondisi aktual implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang masih menghadapi tantangan signifikan. Meskipun telah memiliki landasan regulasi yang jelas melalui Peraturan Walikota, struktur penyelenggara yang terorganisir (BPS sebagai pembina

data, Dinas Kominfo sebagai walidata, dan OPD sebagai produsen data), namun implementasi SDI masih terkendala oleh keterbatasan SDM dengan kualifikasi di bidang data, rendahnya literasi data di kalangan pegawai, dan ego sektoral OPD yang termanifestasi dalam banyaknya aplikasi dan website terpisah (41 aplikasi dan 51 website).

Gap ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakselarasan antara kebijakan formal dan implementasi di lapangan, serta menganalisis efektivitas kebijakan SDI dalam menciptakan ekosistem data terintegrasi di Kota Bengkulu.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penulis menggabungkan VOSviewer dan Publish or Perish untuk mengeksplorasi jurnal, mengevaluasi pengaruh sitasi, dan memahami tren publikasi di bidang kajian (Harzing, 2010). Penelitian terdahulu mengenai implementasi Satu Data Indonesia menunjukkan beragam temuan dan tantangan di berbagai daerah. Wahyuningtyas dan Rokhman (2024) menemukan Kabupaten Banyumas telah mendukung program ini melalui Portal Dimas Satria meski menghadapi kendala SDM. Islami (2021) mengidentifikasi delapan faktor kunci sukses implementasi Satu Data berdasarkan benchmark negara-negara Open Government Partnership, namun masih memerlukan validasi empiris. Mulyono, Lestari, dan Jannah (2024) menyimpulkan bahwa teknologi informasi, kompetensi, dan koordinasi sangat mempengaruhi kinerja Tim Forum Satu Data di Kota Bandar Lampung. Amelia dan Rahayu (2023) menemukan BPS telah menjalankan perannya sebagai pembina data dengan cukup baik meski menghadapi kendala komunikasi dan keterbatasan SDM. Sementara Firmansyah dan Susanto (2023) mengungkapkan rendahnya skor kesiapan implementasi (45,60%) di Jawa Timur dengan 24 masalah teridentifikasi mencakup aspek regulasi, kelembagaan, teknologi, SDM, dan keuangan, yang menunjukkan bahwa implementasi Satu Data masih menghadapi tantangan signifikan di tingkat daerah.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian mengenai "Evaluasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Bengkulu" dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William Dunn (2017) menawarkan kebaruan ilmiah yang mengkaji secara sistematis aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Bengkulu, sebuah wilayah yang belum dieksplorasi dalam studi-studi sebelumnya, sehingga dapat mengisi kesenjangan pengetahuan tentang kesenjangan antara penilaian formal indeks SPBE yang baik (2,61) dengan realitas implementasi di lapangan yang masih menghadapi berbagai tantangan fundamental terkait struktur organisasi, keterbatasan SDM berkualifikasi di bidang data, dan ego sektoral antar OPD yang tercermin dari banyaknya aplikasi dan website terpisah.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Bengkulu dengan menggunakan kerangka teori evaluasi kebijakan William Dunn (2017) yang mencakup aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan implementasi, serta untuk mengidentifikasi upaya Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bengkulu sebagai walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui metode deduktif, yang menurut Abdussamad (2021:29) memungkinkan "peneliti untuk mengungkap makna dan konteks yang lebih komprehensif melalui pemahaman mendalam terhadap gejala-gejala sosial atau fenomena yang diteliti." Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara yang dipilih karena sesuai "dalam situasi di mana jumlah responden relatif terbatas" (Nurdin & Hartati, 2019:179); observasi yang Simangunsong (2017:218) definisikan sebagai "proses pengumpulan informasi yang melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan penelitian"; serta dokumentasi yang mencakup "dokumen-dokumen seperti korespondensi, jurnal pribadi, dokumentasi fotografis, notulensi pertemuan, benda-benda kenangan, serta catatan aktivitas" (Simangunsong 2017:220). Instrumen adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur atau menilai suatu fenomena atau objek tertentu (Darmadi, 2011:85). Analisis data menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti yang termasuk dalam kategori "CAQDAS (Computer-Aided Qualitative Data Analysis Software)" dengan keunggulan "kemampuannya untuk memproses beragam jenis data" (Afriansyah, 2016) melalui tujuh tahapan sistematis: pembuatan Heurmeunistic Unit, input data, pemilihan data dengan quotation, coding, analisis dengan network, pencarian keterhubungan antar kode, dan pembuatan memo.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Bengkulu**

Implementasi program Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Bengkulu diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2022, melibatkan 42 pemangku kepentingan yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Nomor 208 Tahun 2022. Program ini dikelola oleh sekretariat yang dipimpin oleh Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda, dengan dukungan dari berbagai instansi termasuk Diskominfo dan BPS Kota Bengkulu. Meskipun menghadapi tantangan seperti serangan siber pada Pusat Data Nasional pada 23 Juni 2024 yang melumpuhkan portal SDI, implementasi tetap berjalan melalui platform digital INDAH dan ROMANTIK sebagai sistem pengumpulan data terpadu, di mana ROMANTIK berfungsi untuk memberikan rekomendasi kegiatan statistik dan INDAH berperan dalam pengelolaan metadata statistik.

### **3.2 Evaluasi Kebijakan Satu Data Indonesia Di Kota Bengkulu**

#### **1. Efektifitas**

Kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Bengkulu belum mencapai efektifitas yang diharapkan. Implementasi masih pada tahap awal dengan pencapaian minim, berdasarkan laporan kegiatan SDI 2023 yang dikeluarkan Bappeda pada gambar 1.1 hanya 11 data dalam dua tahun dan belum menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan.

**Gambar 1.1**

**Laporan Kegiatan SDI 2023 Pemerintah Kota Bengkulu**



Sumber : Bappeda Kota Bengkulu, 2025

Kendala utama meliputi keterbatasan SDM, anggaran minimal, regulasi belum optimal, dan masalah infrastruktur teknologi. Program masih berjalan secara reaktif tanpa rencana aksi daerah yang jelas, menyebabkan koordinasi sulit dan kemajuan tidak terukur. Belum tercapainya tahap penyebarluasan data menunjukkan kesenjangan signifikan dalam siklus pengelolaan data untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data.

## **2. Efisiensi**

Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Bengkulu menunjukkan efisiensi yang rendah dalam pengelolaan sumber daya. Dari aspek biaya, tidak terdapat alokasi anggaran khusus dengan pendanaan masih menumpang pada sub kegiatan data dan informasi umum, sehingga BPS hanya mampu membina 10 OPD tertentu. Segi waktu terkendala ketiadaan rencana aksi konkret yang menyebabkan pelaksanaan program berjalan dengan "meraba-raba" tanpa target jelas. Permasalahan SDM menjadi kendala utama lainnya, tercermin pada kondisi di Kominfo dimana seksi statistik sebagai walidata hanya ditangani oleh satu orang tanpa dukungan staf, diperparah dengan keterlambatan analisis jabatan yang menghambat penempatan staf pendukung. Keseluruhan dimensi efisiensi menggambarkan pengelolaan sumber daya yang belum optimal dalam implementasi kebijakan tersebut.

### **3. Kecukupan**

Kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Bengkulu menunjukkan hasil yang memadai, di mana kebijakan ini telah berhasil menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebagai output dari evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dengan kategori cukup, melibatkan produsen data termasuk Dinas Lingkungan Hidup sebagai stakeholder kunci, dan mekanisme pelaksanaannya telah sesuai dengan standar SDI nasional. Dari segi orientasi kebutuhan, sistem ini dirancang sebagai tata kelola data terintegrasi yang fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan dukungan pengambilan keputusan berbasis data, mengutamakan ketersediaan data yang akurat, terbuka, dan interoperabel sebagai fondasi rujukan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan data untuk proses pengambilan keputusan berbasis data dan sebagai rujukan pokok dalam setiap kebijakan pemerintahan.

### **4. Kemerataan**

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dinyatakan bahwa data yang mereka kelola sudah memiliki standar nasional dan validitas yang mendukung pengambilan kebijakan daerah. Kedua, dari segi cakupan, meskipun kebijakan ini secara formal mencakup seluruh data yang dihasilkan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2022, namun dalam implementasinya terdapat keterbatasan karena faktor anggaran sebagaimana diungkapkan oleh Kepala BPS yang menyatakan adanya prioritas pembinaan hanya untuk 10 OPD, dan berdasarkan portal Satu Data Indonesia, hanya Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Kominfo yang telah melakukan pembinaan dan menggunggah data.

### **5. Responsivitas**

Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) Kota Bengkulu menunjukkan kesiapan dan respons aparaturnya pemerintah dalam menghadapi tantangan implementasi kebijakan, meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala. Dinas Kominfo tetap berkomitmen menjalankan koordinasi dan sosialisasi meskipun perannya terbatas karena keterbatasan anggaran dan SDM. Bappeda menaruh harapan besar terhadap SDI sebagai solusi strategis untuk mempercepat proses perencanaan pembangunan berbasis data terintegrasi. BPS konsisten menjalankan tugas meskipun tanpa dukungan anggaran memadai, namun menghadapi hambatan berupa lambatnya respons dan minimnya pemahaman OPD terhadap literasi data. Secara keseluruhan, meski terdapat komitmen dari berbagai pihak, pelaksanaan SDI masih terbatas oleh anggaran, SDM, kesadaran yang belum merata, serta koordinasi yang belum optimal.

### **6. Kelayakan**

Hasil evaluasi menunjukkan Indeks SDI Kota Bengkulu sebesar 23,72 yang termasuk kategori "Sangat Kurang", terutama karena lemahnya kinerja pada Domain Penyelenggaraan SDI dan Data Leadership.

**Gambar 1.2**

**Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI Kota Bengkulu**

No.	Indeks	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	34%	46,96
2	Domain Penyelenggaraan SDI	43%	11,05
3	Domain Data Leadership	23%	13,04
Indeks SDI			<b>23,72</b>

Sumber : Bappenas RI, 2025

Hal ini berdampak pada rendahnya manfaat SDI, seperti kurang optimalnya efisiensi pengelolaan data, terbatasnya koordinasi antar OPD, serta belum maksimalnya dukungan data dalam perencanaan kebijakan. Keterbatasan anggaran dan belum meratanya implementasi SDI di seluruh OPD menjadi faktor utama penghambat kelayakan kebijakan ini.

**3.3 Upaya Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Bengkulu Sebagai Walidata Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Kota Bengkulu**

1. Portal Satu Data Indonesia di Tingkat Pemerintahan Kota
2. Koordinasi Forum Penyelenggara SDI
3. Penyebarluasan Informasi SDI

**3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Implementasi SDI di Kota Bengkulu (Indeks SDI 23,72 - "Sangat Kurang") menunjukkan tantangan yang lebih serius dibandingkan daerah lain seperti Jawa Timur yang diteliti oleh Firmansyah dan Susanto (2023) dengan skor kesiapan 45,60%. Meskipun memiliki kesamaan dengan Kabupaten Banyumas dalam hal landasan hukum dan infrastruktur digital (platform INDAH dan ROMANTIK vs Portal Dimas Satria) yang diteliti Wahyuningtyas dan Rokhman (2024), Kota Bengkulu tertinggal signifikan dalam partisipasi OPD (hanya 4 dari 42 OPD atau 9,5% vs 29 Perangkat Daerah di Banyumas). Keterbatasan SDM yang ekstrem (hanya 1 orang di seksi statistik Kominfo) juga ditemukan di daerah lain seperti yang diidentifikasi dalam penelitian Wahyuningtyas dan Rokhman (2024) serta Amelia dan Rahayu (2023). Permasalahan koordinasi antar instansi yang lemah sebagaimana ditemukan Mulyono, Lestari, dan Jannah (2024), alokasi anggaran yang tidak tepat yang juga diidentifikasi Firmansyah dan Susanto (2023), serta ketiadaan rencana aksi jelas yang ditekankan Islami (2021) merupakan kendala umum dalam implementasi SDI. Temuan ini memperkuat argumen bahwa implementasi SDI di Indonesia masih menghadapi tantangan sistemik yang memerlukan pendekatan komprehensif sesuai critical success factors yang diidentifikasi Islami (2021).

**IV. KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan ini masih belum optimal dengan Indeks SDI sebesar 23,72 yang termasuk kategori "Sangat Kurang". Meskipun telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2022 dan infrastruktur digital berupa platform INDAH dan ROMANTIK, kebijakan ini menghadapi berbagai kendala signifikan seperti keterbatasan anggaran yang tidak dialokasikan secara khusus, minimnya SDM (terutama di seksi statistik Kominfo yang hanya ditangani oleh satu

orang), lemahnya koordinasi antar OPD, serta ketiadaan rencana aksi daerah yang jelas. Meskipun beberapa aspek menunjukkan hasil positif seperti tercapainya Indeks Pembangunan Statistik dengan kategori cukup dan adanya komitmen dari beberapa instansi seperti Kominfo, Bappeda, dan BPS, namun cakupan implementasi masih sangat terbatas dengan hanya 4 dari 42 OPD yang aktif berpartisipasi (Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Kominfo), sehingga belum mampu menjadi referensi utama dalam pengambilan kebijakan dan belum memberikan manfaat optimal bagi tata kelola pemerintahan berbasis data di Kota Bengkulu.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih dan apresiasi mendalam kepada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan akses dalam pengumpulan data penelitian. Penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dan mendukung kelancaran serta keberhasilan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Afriansyah, E. A. (2016). Penggunaan software ATLAS.ti sebagai alat bantu proses analisis data kualitatif. *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika*, 5(2), 53-63.
- Amelia, R., & Rahayu, A. S. Y. (2023). ANALYSIS OF SATU DATA INDONESIA POLICY IMPLEMENTATION: THE ROLE OF BPS-STATISTICS INDONESIA AS A STATISTICAL DATA COACH. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 708-719.
- Azizah, Y., & Permana, I. (2025). Upaya Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 7-7.
- Budhijanto, Danrivanto. (2022). E-Government Law & Regulations: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia-DANRIVANTO 2022.
- Darmadi, H. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung : Alfabeta
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: an integrated approach (sixth edit)*. Routledge
- Firmansyah, A. D., & Susanto, T. D. (2023). The unsuccessful of Satu Data Indonesia (SDI) implementation: a lesson learned from local government. *Jurnal Mantik*, 7(1), 311-320.
- Harzing, A. W. (2010). *The publish or perish book*. Melbourne, Australia: Tarma Software Research Pty Limited.
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 10(1), 13-23.

Mulyono, S., Lestari, W. R., & Jannah, W. (2024). ANALISIS PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI, KOMPETENSI DAN KOORDINASI TERHADAP KINERJA TIM FORUM SATU DATA TINGKAT KOTA BANDAR LAMPUNG. *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 8(6), 21-30.

Nuridin. I & Hartati. (2019). Metodologi Penelitian Sosial.

Simangunsong, F. (2017). Metode Penelitian Pemerintahan. Alfabeta.

Sutanta, E., & Istiyanto, J. E. (2012). Kebijakan Standarisasi Data Dan Problem Interoperabilitas Pada Aplikasi E-Government. *Ccit Journal*, 6(1), 1-16.

Wahyuningtyas, N. L., & Rokhman, A. (2024). PERAN KABUPATEN BANYUMAS DALAM Mendukung PROGRAM FORUM SATU DATA. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 470-480.

